

Nomor : B/348/RB.04/2021

04 Oktober 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Pelaksanaan Survei Reformasi Birokrasi
dan Zona Integritas 2021**

Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga Negara;**
- 2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;**
- 3. Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian;**
- 4. Sekretaris Mahkamah Agung;**
- 5. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;**
- 6. Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI;**
- 7. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI;**
- 8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;**
- 9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

Dalam rangka mengetahui perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dilakukan pada seluruh Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB melaksanakan survei eksternal hasil penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas (SHPRBZI). Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2021 pelaksanaan SHPRBZI juga akan dilakukan sepenuhnya secara daring dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Survei pembangunan **Zona Integritas (ZI)** dilaksanakan pada seluruh unit kerja yang telah diusulkan kepada KemenPANRB melalui pmpzi.menpan.go.id dengan surat usulan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) di masing-masing Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

2. Survei pelaksanaan **Reformasi Birokrasi (RB)** dilaksanakan pada unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kementerian/Lembaga: 3 Unit Layanan *Core Business* yang tidak diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Tim Penilai Nasional (TPN) dan belum pernah mendapat predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Non-ZI).

b. Pemerintah Provinsi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Rumah Sakit Umum Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah dengan jumlah keseluruhan 4 unit kerja;

c. Pemerintah Kabupaten/Kota: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian Daerah dan Puskesmas dengan jumlah keseluruhan 4 unit kerja;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 210928YSEY



d. Unit kerja *sampling* survei RB pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti disebut pada poin (b) dan (c) yang **sudah diusulkan** pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dapat **digantikan** dengan unit kerja lainnya sehingga jumlah keseluruhan yang menjadi *sampling* survei RB adalah 4 unit kerja.

3. Kementerian PANRB akan melaksanakan SHPRBZI pada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah mulai hari **Senin, 4 Oktober 2021 s.d Selasa, 12 Oktober 2021** menggunakan aplikasi pada *surveirbzi.menpan.go.id*. Untuk informasi lebih lanjut dan teknis dapat menghubungi 0821-1311-6900 melalui *Whatsapp*.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 210928YSEY



Balai
Sertifikasi
Elektronik